



ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PROVINSI DI PULAU JAWA DAN PULAU KALIMANTAN TAHUN ANGGARAN 2024

Naning Setiani¹⁾, Aris Eddy Sarwono²⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

¹, nastyani713@gmail.com, ² aris_sarnur@yahoo.co.id

ARTICLE HISTORY

Received:

May 3, 2025

Revised

June 27, 2025

Accepted:

June 27, 2025

Online available:

June 29, 2025

Keyword:

Fiscal Decentralization,
Fiscal Dependency,
Financial Performance,
And Regional Autonomy

*Correspondence:

Name: Naning Setiani

E-mail: nastyani713@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: This study analyzes the comparison of financial performance between provinces in Java and Kalimantan during the 2024 fiscal year. The aim of this research is to assess the level of fiscal dependency and the degree of fiscal decentralization as indicators of regional financial performance. **Methods:** This quantitative descriptive study uses secondary data obtained from the 2024 Budget Realization Reports (LRA) of eleven provinces, consisting of six from Java and five from Kalimantan. The analysis employs two financial ratios: the fiscal dependency ratio and the degree of fiscal decentralization.

Results: The results show that provinces in Java exhibit lower fiscal dependency and higher fiscal decentralization compared to those in Kalimantan. Banten, DKI Jakarta, and West Java demonstrate the best financial performance, with dependency ratios below 30% and decentralization degrees above 70%. In contrast, provinces such as North Kalimantan and Central Kalimantan show dependency levels above 60% and decentralization degrees below 35%. These findings reflect a significant gap in fiscal independence between regions. In conclusion, increasing Local Own-Source Revenue (PAD) through local economic development and improved governance is crucial to enhancing fiscal autonomy in Kalimantan provinces.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Sayadi, 2020). Mutiha (2018) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mahmudi (2016), pengelolaan APBD yang baik ditunjukkan melalui rasionalisasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan PAD, serta efisiensi dalam alokasi belanja daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kapasitas fiskal, memperluas ruang fiskal daerah, serta memperkuat otonomi daerah dalam menjalankan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sayadi (2020) yang menyatakan bahwa provinsi dengan realisasi PAD yang tinggi memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang rendah dan menunjukkan derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik. Penelitian lain oleh Harjito et al., (2020) juga menegaskan bahwa kinerja APBD, khususnya pada aspek pendapatan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam APBD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tersebut.

Oleh karena itu, analisis terhadap struktur dan rasio dalam APBD, seperti rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal menjadi sangat penting. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui rasio ketergantungan keuangan dan derajat desentralisasi fiskal. Rasio ketergantungan mengukur proporsi pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah, sedangkan derajat desentralisasi mengukur proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Kedua rasio ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kemandirian dan keberdayaan fiskal suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan secara otonom.

Dalam konteks nasional, terdapat disparitas yang cukup mencolok dalam kinerja keuangan antar provinsi di berbagai pulau. Pulau Jawa, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi nasional, umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti Kalimantan. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik, yang tercermin dari kontribusi PAD yang signifikan terhadap total pendapatan daerah. Dalam hal ini, Zukhri (2020) menyatakan bahwa provinsi-provinsi yang terletak di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan, masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap transfer fiskal, yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal. Hal ini terkait dengan terbatasnya kapasitas ekonomi daerah dan ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang belum cukup produktif dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian oleh Ratnawati & Sari (2023) juga menegaskan adanya perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan antara provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Mereka mengidentifikasi bahwa provinsi-provinsi di Kalimantan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, yang berimbas pada ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Temuan ini menyoroti pentingnya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi sektor ekonomi lokal dan peningkatan kontribusi PAD.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nasution (2018), kinerja keuangan daerah mencerminkan hasil dari pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan implementasi visi, misi, dan strategi suatu daerah sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan, baik untuk perencanaan keuangan di masa mendatang maupun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan pada masing-masing daerah. Pengukuran tersebut mencakup pada tingkat pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan (Arfan et al., 2023)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar proporsi dana transfer yang diterima daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan kata lain, semakin besar dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan (%)	Pola Hubungan
< 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Banga (2017) dalam (Sayadi, 2020)

Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016) tingkat desentralisasi fiskal diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber-sumber pendapatannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat desentralisasi fiskal yang dimiliki daerah tersebut, yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam mengelola keuangannya. Untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal daerah, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Desentralisasi Fiskal
< 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Wahab et al., 2017)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah provinsi berdasarkan data keuangan yang tersedia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena fiskal yang terjadi di masing-masing daerah tanpa melakukan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024. Data tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan dapat diakses melalui situs resmi DJPK (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Objek dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, dengan kriteria utama bahwa provinsi tersebut telah menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 secara lengkap. Provinsi yang dianalisis terdiri dari enam provinsi di Pulau Jawa dan lima provinsi di Pulau Kalimantan, sehingga total terdapat sebelas provinsi yang menjadi fokus kajian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua rasio keuangan, yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah, sedangkan rasio derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Hasil perhitungan kedua rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan dan kemandirian fiskal masing-masing provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada 11 provinsi yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Pemilihan provinsi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran komparatif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator rasio keuangan selama periode tahun anggaran 2024. Provinsi yang dipilih merupakan representasi wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta memiliki data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lengkap, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024. Adapun daftar provinsi yang dianalisis disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Daftar provinsi di pulau Jawa dan Kalimantan

No	Provinsi	Terletak di pulau	LRA Tahun 2024
1	DKI Jakarta	Jawa	Ada
2	Jawa Barat	Jawa	Ada
3	Banten	Jawa	Ada
4	Jawa Tengah	Jawa	Ada
5	DI Yogyakarta	Jawa	Ada
6	Jawa Timur	Jawa	Ada
7	Kalimantan Barat	Kalimantan	Ada
8	Kalimantan Tengah	Kalimantan	Ada
9	Kalimantan Selatan	Kalimantan	Ada
10	Kalimantan Timur	Kalimantan	Ada
11	Kalimantan Utara	Kalimantan	Ada

Sumber : Data Diolah, 2025

Sebaran provinsi dalam tabel 3 menunjukkan keterwakilan dari dua wilayah strategis di Indonesia, yakni Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kependudukan, serta Pulau Kalimantan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Pemilihan dua pulau ini didasarkan pada perbedaan karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal masing-masing daerah, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang beragam mengenai kinerja pengelolaan APBD. Analisis kinerja keuangan dilakukan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 yang tersedia untuk seluruh provinsi dalam cakupan penelitian. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja keuangan, berikut

disajikan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Tabel 4
Laporan Realisasi Anggaran Pulau Jawa dan Kalimantan Tahun Anggaran 2024

Uraian	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak Daerah	44.391,63	25.291,49	8.552,41	14.210,24	2.145,84	19.102,76
Retribusi Daerah	689,14	1.039,72	238,62	2.318,76	74,58	3.088,32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	631,39	393,13	51,91	687,81	120,94	471,69
Lain-Lain PAD yang Sah	4.466,79	705,36	181,45	434,11	123,07	799,18
Total PAD	50.178,95	27.429,70	9.024,39	17.650,92	2.464,43	23.461,95
TKDD						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.809,56	10.999,81	3.361,18	8.701,44	3.543,61	11.956,41
Pendapatan Lainnya						
Pendapatan Hibah	12,93		6,43	25,60	8,41	63,09
Lain-Lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		11,41		0,74		5,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah					1,13	
Total Pendapatan Lainnya	12,93	11,41	6,43	26,34	9,54	68,75
Total Pendapatan Daerah	68.988,51	38.440,92	12.392,00	26.378,70	6.017,58	35.487,11

Uraian	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pendapatan Asli Daerah					
Pajak Daerah	2.707,70	2.371,13	2.262,68	3.816,24	752,61
Retribusi Daerah	399,05	11,81	327,27	262,84	10,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122,47	38,85	57,23	166,85	11,37
Lain-Lain PAD yang Sah	140,61	378,9	366,35	148,98	232,62
Total PAD	3.369,83	2.800,69	3.013,53	4.394,91	1.007,36
TKDD					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.088,96	5.326,98	3.114,76	5.152,84	2.417,28
Pendapatan Lainnya					
Pendapatan Hibah	2,55	9,36	2,81	8,70	0,38
Lain-Lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		85,22			1,39
Pendapatan Transfer Antar Daerah		3,67	2,50		
Total Pendapatan Lainnya	2,55	98,25	5,31	8,70	1,77
Total Pendapatan Daerah	6.461,34	8.225,92	6.133,60	9.556,45	3.426,41

Sumber : djpk kemenkeu, 2024 (diolah peneliti, 2025)

Dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan pada Tabel 4, selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja fiskal masing-masing provinsi. Rasio keuangan yang digunakan dalam

analisis ini meliputi rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal, yang masing-masing mencerminkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Provinsi	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase Ketergantungan	Pola Hubungan
1	DKI Jakarta	18.809,56 M	69.001,45 M	27,260%	Sedang
2	Jawa Barat	10.999,81 M	38.440,91 M	28,615%	Sedang
3	Banten	3.361,18 M	12.392,00 M	27,124%	Sedang
4	Jawa Tengah	8.701,44 M	26.378,70 M	32,987%	CukupTinggi
5	DI Yogyakarta	3.543,61 M	6.017,58 M	58,888%	Sangat Tinggi
6	Jawa Timur	11.956,41 M	35.487,11 M	33,692%	CukupTinggi
7	Kalimantan Barat	3.088,96 M	6.461,34 M	47,807%	Tinggi
8	Kalimantan Tengah	5.326,98 M	8.225,92 M	64,758%	Sangat Tinggi
9	Kalimantan Selatan	3.114,76 M	6.133,60 M	50,782%	Sangat Tinggi
10	Kalimantan Timur	5.152,84 M	9.556,44 M	53,920%	Sangat Tinggi
11	Kalimantan Utara	2.417,28 M	3.426,41 M	70,548%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat lima provinsi yang memiliki persentase ketergantungan di atas 50%, yang mengindikasikan tingkat ketergantungan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, provinsi dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah dikelompokkan ke dalam kategori sedang, cukup tinggi, dan tinggi. Jika diurutkan berdasarkan pola hubungan tingkat ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi, provinsi dengan tingkat ketergantungan sedang adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, masing-masing dengan persentase ketergantungan sebesar 27,260%, 28,615%, dan 27,124%. Pada kategori cukup tinggi, terdapat Provinsi Jawa Tengah dengan rasio 32,987% dan Jawa Timur dengan rasio 33,692%. Sementara itu, Kalimantan Barat berada pada kategori tinggi dengan persentase ketergantungan sebesar 47,807%.

Adapun provinsi yang tergolong dalam kategori ketergantungan sangat tinggi meliputi DI Yogyakarta dengan persentase 58,888%, Kalimantan Selatan sebesar 50,782%, Kalimantan Timur sebesar 53,920%, Kalimantan Tengah sebesar 64,758%, dan Kalimantan Utara sebesar 70,548%. Hasil ini menunjukkan bahwa lima provinsi tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat besar terhadap pemerintah pusat, sehingga mencerminkan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Perbandingan tingkat ketergantungan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Perbandingan tingkat ketergantungan keuangan daerah
Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari hasil analisis, provinsi dengan kinerja keuangan terbaik berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah Banten dengan rasio 27,124%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 27,260%, dan Jawa Barat sebesar 28,615%. Perbandingan kinerja keuangan antara provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada kategori ketergantungan sedang dan cukup tinggi, seluruhnya ditempati oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sedangkan provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan didominasi oleh tingkat ketergantungan tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Table 1
Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase Ketergantungan	Pola Hubungan
1	DKI Jakarta	50.178,96 M	69.001,45 M	72,722%	Sangat Baik
2	Jawa Barat	27.429,69 M	38.440,91 M	71,355%	Sangat Baik
3	Banten	9.024,38 M	12.392,00 M	72,824%	Sangat Baik
4	Jawa Tengah	17.650,92 M	26.378,70 M	66,914%	Sangat Baik
5	DI Yogyakarta	2.464,43 M	6.017,58 M	40,954%	Baik
6	Jawa Timur	23.461,95 M	35.487,11 M	66,114%	Sangat Baik
7	Kalimantan Barat	3.369,83 M	6.461,34 M	52,154%	Sangat Baik
8	Kalimantan Tengah	2.800,69 M	8.225,92 M	34,047%	Sedang
9	Kalimantan Selatan	3.013,53 M	6.133,60 M	49,132%	Sangat Baik
10	Kalimantan Timur	4.394,91 M	9.556,44 M	45,989%	Sangat Baik
11	Kalimantan Utara	1.007,36 M	3.426,41 M	29,400%	Cukup

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Provinsi dengan tingkat desentralisasi di atas 50% memiliki kontribusi PAD yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan analisis, hanya ada tiga provinsi yang memiliki derajat desentralisasi sangat baik, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan rasio masing-masing 72,722%, 71,355%, dan 72,824%. Ketiga provinsi ini mampu mengandalkan pendapatan asli daerah yang lebih besar, sehingga memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Perbandingan Tingkat Derajat Desentralisasi
Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Sementara itu, provinsi dengan derajat desentralisasi di bawah 50% menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Provinsi yang memiliki desentralisasi lebih rendah, seperti Kalimantan Utara dengan rasio 29,400% dan Kalimantan Tengah dengan 34,047%, menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan rendahnya kapasitas provinsi-provinsi tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya lokal mereka. Perbandingan tingkat desentralisasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Perbandingan kinerja keuangan antar provinsi menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, memiliki kinerja keuangan yang sangat baik berdasarkan derajat desentralisasi. Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan umumnya berada pada level desentralisasi yang lebih rendah, mencerminkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Analisis ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa, dengan kemampuan mengelola PAD yang lebih tinggi, memiliki derajat desentralisasi yang lebih baik dibandingkan provinsi di Pulau Kalimantan.

Kinerja keuangan daerah yang baik berdasarkan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Provinsi dengan PAD yang lebih tinggi, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menunjukkan tingkat desentralisasi yang sangat baik, yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal, dapat disimpulkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, secara umum memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang lebih rendah serta derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang kuat, didukung oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan terhadap total pendapatan daerah.

Sebaliknya, provinsi di Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal di wilayah ini mencerminkan tantangan dalam mengoptimalkan potensi PAD, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, struktur ekonomi berbasis sektor primer, dan tingkat urbanisasi yang relatif rendah dibandingkan Pulau Jawa.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, perlu dilakukan strategi yang terarah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, penguatan sektor ekonomi lokal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan iklim investasi. Upaya-upaya ini penting untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah yang lebih berkelanjutan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis Rasio Pendapatan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2020. *JURNAL ECONOMINA*, 2(4), 979–992. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i4.481>
- djpk kemenkeu. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=17&pemda=00>
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik* (Edisi Ketiga, Cetakan Pertama). Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN.
- Mutiha, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Propinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.03>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN SUMATERA PERIODE 2020-2022). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1515>
- Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96–104. <https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958>
- Wahab, A. O. L., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah (KEUDA)*, 2(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/229203832.pdf>
- Zukhri, N. (2020). *KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL*. 2.